

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1. PEMERIKSAAN AKUNTANSI (AUDITING)

II.1.1. Definisi Pemeriksaan Akuntansi (Auditing)

Definisi auditing menurut *Report of Committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting Association* (Accounting Review, vol. 47) definisi auditing seperti dikutip Bonyton dan Johnson (2002, 5) adalah:

Suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-aseri kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Auditing sebagai proses sistematis dengan serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur dan terorganisir yang memiliki perencanaan audit dan perumusan strategi audit. Agar tujuan audit tercapai, perencanaan dan perumusan strategi membutuhkan banyak pengambilan keputusan pada saat prosedur pemilihan bukti audit dilakukan.

Bukti audit adalah dasar penentuan pendapat profesional auditor. Bukti audit diperoleh dan dievaluasi secara obyektif, tanpa memihak terhadap bukti-bukti yang ada. Bukti audit dipilih berawal dari pernyataan atau asersi manajemen yang melekat dalam laporan keuangan.

Asersi-aseri manajemen meliputi informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, laporan operasi internal, dan laporan biaya maupun pendapatan berbagai pusat pertanggung jawaban klien. Asersi-aseri manajemen merupakan

kejadian ekonomi hasil proses akuntansi yang harus memenuhi syarat, yaitu: dinyatakan dalam kuantitas (*quantifiable*) dan dapat diaudit (*auditable*).

Kejadian ekonomi adalah hasil proses akuntansi yang dapat dihimpun dan dievaluasi untuk menunjukkan derajat kedekatan asersi agar dapat diidentifikasi dan dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Hasil identifikasi dan perbandingan asersi dengan kriteria yang ditetapkan sebelumnya dapat berbentuk kuantitatif (contoh jumlah kekurangan dana kas kecil) atau berbentuk kualitatif (contoh kewajaran laporan keuangan).

Hasil audit dikomunikasikan melalui laporan tertulis sebagai kesimpulan derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil audit dapat mempengaruhi naik-turun derajat kepercayaan informasi keuangan maupun asersi yang dibuat klien dan dapat digunakan pihak yang berkepentingan (Pemegang saham, manajemen, kreditor, kantor pemerintahan dan masyarakat luas) dalam mengambil keputusan ekonomi.

II.1.2. Tujuan Pemeriksaan Akuntansi (Auditing)

Tujuan umum dari penugasan pemeriksaan akuntansi terhadap laporan keuangan adalah memberikan pernyataan apakah klien telah menyajikan laporan keuangan secara wajar, dalam semua aspek yang material sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum (Munawir: Auditing Modern 1, hal 121).

Tujuan umum audit diperoleh melalui penghimpunan bukti audit kompeten yang cukup. Bukti kompeten yang cukup diperoleh dengan cara mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik berdasarkan asersi manajemen

dalam laporan keuangan. Tujuan audit spesifik akan membantu auditor mengidentifikasi bukti apa yang dihimpun dan bagaimana cara menghimpun bukti tersebut (Abdul Halim: Auditing, hal 147).

Tujuan Audit Spesifik Dalam memperoleh bukti untuk mendukung pendapat atas laporan keuangan, auditor mengembangkan tujuan spesifik bagi setiap akun dalam laporan keuangan. Auditor mengidentifikasi tujuan audit spesifik (*specific audit objective*) berdasarkan asersi manajemen dalam laporan keuangan karena setiap tujuan audit memerlukan bukti audit yang berbeda. Tujuan audit spesifik dikembangkan untuk setiap asersi. Selain itu tujuan audit juga dikembangkan untuk transaksi relevan yang mempengaruhi piutang usaha, dan aspek penting pada saldo akun piutang usaha sebagaimana dilaporkan pada tanggal neraca. Dengan memahami tujuan audit spesifik ini, auditor akan mampu memahami salah saji yang mungkin akan timbul dalam laporan keuangan.

Asersi manajemen atau pernyataan manajemen diklasifikasikan berdasarkan pengolongan sebagai berikut:

1. Keberadaan atau Keterjadian (*existence or occurrence*)

Asersi keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang satuan usaha ada pada tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu.

2. Kelengkapan (*completeness*)

Asersi kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi atau semua rekening (*account*) yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan didalamnya.

3. Hak dan Kewajiban (*rights and obligations*)

Asersi hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak perusahaan dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu.

4. Penilaian atau Alokasi (*valuation or allocation*)

Asersi penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.

5. Penyajian dan Pengungkapan (*presentation and disclosure*)

Asersi penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya.

Berikut ini adalah tujuan audit berdasarkan Asersi manajemen atau pernyataan manajemen:

a. Tujuan Audit untuk **Asersi Keberadaan dan keterjadian** (*existence and occurrence*). Berkaitan dengan masalah keberadaan dan keterjadian (*existence and occurrence*), biasanya auditor akan memastikan hal-hal sebagai berikut:

- Validitas/pisah batas (*cutoff*): semua transaksi tercatat benar-benar telah terjadi selama periode akuntansi.
- Validitas (*validity*): semua aktiva, kewajiban, ekuitas adalah valid dan telah dicatat sebagaimana mestinya dalam neraca.

- b. Tujuan Audit untuk **Asersi Kelengkapan** (*completeness*) Berkaitan dengan masalah kelengkapan (*completeness*), auditor biasanya memastikan hal-hal sebagai berikut:
- Kelengkapan/pisah batas (*cutoff*): semua transaksi yang terjadi dalam periode itu telah tercatat.
 - Kelengkapan (*completeness*): semua saldo yang tercantum dalam neraca meliputi semua aktiva, kewajiban dan ekuitas sebagaimana mestinya.
- c. Tujuan Audit untuk **Asersi Hak dan Kewajiban** (*rights and obligations*). Tentang masalah hak dan kewajiban (*rights and obligations*), biasanya auditor menguji kepemilikan (*ownership*), kesesuaian atas hak entitas terhadap aktiva, serta hak kepemilikan yang jelas terhadap aktiva. Apabila ingin mempertimbangkan kelangsungan usaha dan arus kas, auditor akan mengukur resiko kemungkinan klien telah menggadaikan akan menjual piutang, dan selanjutnya merencanakan untuk melakukan pengujian atas hak kepemilikan yang sesuai.
- d. Tujuan Audit untuk **Asersi Penilaian dan Alokasi** (*valuation or allocation*). Berkaitan dengan masalah penilaian atau alokasi (*valuation allocation*), biasanya auditor akan memastikan hal-hal sebagai berikut:
- Penerapan GAAP (*application of GAAP*). Bahwa saldo telah dinilai sebagaimana mestinya untuk mencerminkan penerapan GAAP dalam hal penilaian kotor dalam alokasi jumlah tertentu antar periode (seperti penyusutan dan amortisasi).

- Pembukuan dan pengikhtisaran (*posting and summarization*). Transaksi telah dibukukan dan diikhtisarkan sebagaimana mestinya dalam jurnal dan buku besar.
 - Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Saldo-saldo telah dinilai sebagaimana mestinya pada nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- e. Tujuan Audit untuk **Asersi Penyajian dan Pengungkapan** (*valuation and disclosure*). Berkaitan dengan masalah penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*), biasanya auditor akan memastikan hal-hal sebagai berikut:
- Pengklasifikasian (*classification*). Transaksi dan saldo telah diklasifikasikan sebagaimana mestinya dalam laporan keuangan
 - Pengungkapan (*disclosure*). Semua pengungkapan yang dipersyaratkan oleh GAAP telah tercantum dalam laporan keuangan.

II.1.3. Risiko Audit

Risiko audit (*audit risk*) adalah risiko bahwa auditor mungkin tanpa sengaja telah gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat mengenai laporan keuangan yang mengandung salah saji material (Bonyton & Johnson, 2002: 337).

Risiko audit harus dipertimbangkan untuk merencanakan audit dan merencanakan prosedur audit secara efisien dan efektif. Semakin pasti auditor menyatakan pendapat, semakin rendah risiko audit yang ditanggung auditor. Risiko audit memiliki hubungan terbalik dengan jumlah bukti audit yang

diperlukan, semakin rendah risiko audit maka semakin banyak bukti audit yang diperlukan.

Terdapat tiga unsur risiko audit, yaitu:

1. Risiko Bawaan (*inherent risk*)

Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait (Mulyadi, Auditing buku 1:167).

Risiko bawaan muncul secara independen dari audit laporan keuangan dan selalu ada. Tingkat aktual risiko bawaan tidak dapat diubah. Auditor dapat menempuh cara dengan mengubah tingkat risiko bawaan klien yang dinilai.

2. Risiko Pengendalian (*control risk*)

Risiko pengendalian adalah risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas (Mulyadi, Auditing buku 1:167).

Risiko pengendalian berhubungan dengan efektivitas pengendalian intern klien. Pengendalian yang efektif akan mengurangi risiko pengendalian, dan pengendalian yang tidak efektif akan meningkatkan risiko pengendalian.

Tingkat aktual risiko pengendalian untuk suatu asersi tidak dapat diubah, tetapi masih dapat ditempuh dengan memvariasikan tingkat risiko pengendalian yang dinilai dengan memodifikasi (1) prosedur-prosedur dalam pemahaman pengendalian intern yang berhubungan dengan asersi, (2)

prosedur-prosedur yang digunakan dalam untuk melaksanakan pengujian pengendalian intern.

3. Risiko Deteksi (*detection risk*)

Risiko deteksi adalah risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi (Mulyadi, Auditing buku 1:167).

Risiko deteksi dapat dinyatakan sebagai kombinasi dari risiko prosedur analitis dan risiko pengujian terinci. Risiko prosedur analitis dan risiko pengujian terinci adalah fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapan audit. Tingkat aktual dari risiko prosedur analitis dan risiko pengujian terinci dapat dirubah dengan memvariasikan sifat, waktu, luas dan staffing yang berhubungan dengan pengujian substantif suatu asersi.

II.1.4. Standar audit

Standar Auditing merupakan suatu kaidah agar mutu auditing dapat dicapai sebagaimana mestinya (Abdul Halim, 2003:47).

Standar auditing harus diterapkan dalam setiap audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor independen. Standar auditing diterapkan tanpa memandang ukuran besar kecil usaha klien, bentuk organisasi bisnis dan jenis organisasi nirlaba atau bukan. Penerapan keseluruhan standar auditing sangat dipengaruhi konsep materialitas dan risiko.

Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA), yaitu:

1. Standar Umum

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b. Dalam segala hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib mempergunakan keahlian psofesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan lapangan

- a. Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten mereka harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu dan luasnya pengujian yang akan dilakukan.
- c. Bukti yang kompeten dan cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.
- b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan bahwa prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode

berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan periode sebelumnya.

- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang cukup memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Laporan audit harus memuat suatu pengutaraan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau memuat suatu penjelasan yang semstinya apabila pendapat demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasan-alasannya harus dikemukakan. Dalam semua hal yang nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.

II.1.5. Prosedur audit

Prosedur audit (*audit procedures*) adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit yang tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit (Mulyadi, Auditing buku 1: 86).

Standar pekerjaan lapangan ketiga menyebutkan beberapa prosedur audit yang harus dilaksanakan dalam mengumpulkan berbagai tipe bukti audit. Evaluasi pengendalian intern klien mengharuskan prosedur audit dilaksanakan. Berikut prosedur audit yang dilaksanakan dalam rangka pengumpulan bukti yang berkaitan penilaian efektivitas pengendalian intern klien:

a. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan merupakan prosedur audit yang dilaksanakan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan (Mulyadi, Auditing buku 1: 87).

Kegiatan dapat berupa pemrosesan rutin jenis transaksi tertentu, untuk melihat apakah para pekerja sedang melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Obyek pengamatan auditor adalah karyawan, prosedur dan proses kegiatan.

b. Wawancara (*inquiring*)

Prosedur ini merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Bukti audit yang dihasilkan prosedur ini lisan dan dokumenter (Mulyadi, Auditing buku 1: 87).

c. Inspeksi (*inspection*)

Inspeksi adalah pemeriksaan rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu (Mulyadi, Auditing buku 1: 87).

Prosedur inspeksi bertujuan menentukan keaslian dokumen, untuk mendapat keyakinan memadai bahwa dokumen dan atau aktiva berwujud mendukung representasi manajemen dalam laporan keuangan.

d. Pelaksanaan akuntansi (*reperforming*)

Prosedur ini merupakan pengulangan aktivitas yang dilaksanakan klien (Mulyadi, Auditing buku 1: 88).

Prosedur ini dapat berupa perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat klien, misalnya menghitung ulang total jurnal. Prosedur ini dapat melaksanakan

ulang beberapa aspek pemrosesan transaksi tertentu untuk menentukan proses awal telah sesuai dengan pengendalian intern yang dirumuskan.

II.1.5.1. Tujuan Prosedur audit

Auditor melaksanakan prosedur audit untuk mencapai tujuan berikut:

1. Pemahaman pengendalian intern, untuk menilai risiko dari salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi. Prosedur dipakai : wawancara, inspeksi dan pengamatan.
2. Untuk menguji operasi efektif dari pengendalian dalam mencegah dan mendeteksi salah saji material pada tingkat asersi (pengujian pengendalian). Prosedur dipakai : wawancara, inspeksi, pelaksanaan akuntansi dan pengamatan.
3. Untuk mendukung asersi atau mendeteksi salah saji material pada tingkat asesi (pengujian substantif).

II.2. STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN

II.2.1. Definisi Struktur Pengendalian Intern

Definisi struktur pengendalian intern menurut *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* dalam laporan yang berjudul *Intern Control-Integrated Framework* tahun 1992 adalah sebagai berikut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2001 : SA Seksi 319, p.6):

“Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Dari definisi struktur pengendalian intern terdapat beberapa konsep dasar berikut ini:

1. Struktur pengendalian intern merupakan suatu *proses*. Ini berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir, bukan akhir itu sendiri. Struktur pengendalian intern merupakan bagian tidak terpisahkan dari infrastruktur entitas.
2. Struktur pengendalian intern dilaksanakan oleh *orang*. Struktur pengendalian intern bukan hanya suatu manual kebijakan dan formulir-formulir, tetapi orang pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya.
3. Struktur pengendalian intern diharapkan untuk menyediakan hanya *keyakinan memadai*, bukan keyakinan yang mutlak, kepada manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena keterbatasan yang melekat dalam suatu struktur pengendalian intern dan perlunya untuk mempertingkatkan biaya dan manfaat relative dari pengadaan pengendalian.
4. Struktur pengendalian intern diarahkan pada pencapaian tujuan dalam kategori yang paling tumpang tindih dari pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

II.2.2. Penanggungjawab dalam Struktur Pengendalian Intern

Penanggung jawab struktur pengendalian intern (Bonyton & Johnson, 2002: 377-378).

1. Manajemen

Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara efektif pengendalian intern organisasinya. Direktur utama perusahaan bertanggung jawab menciptakan atmosfer pengendalian di tingkat puncak dan bertanggung jawab menjamin semua komponen struktur pengendalian intern terwujud di dalam organisasi.

2. Dewan komisaris dan komite audit

Dewan komisaris bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab dalam mengembangkn dan menyelenggarakan struktur pengendalian intern.

3. Auditor intern

Auditor intern bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi apakah struktur pengendalian intern memadai atau tidak dan membuat rekomendasi peningkatan.

4. Auditor independen

Sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan. Auditor dapat menemukan kelemahan struktur pengendalian intern klien, sehingga auditor dapat mengkomunikasikan temuan audit kepada manajemen, komite audit atau dewan komisaris.

5. Pihak luar lain

Pihak luar lain yang bertanggung jawab atas struktur pengendalian intern entitas adalah badan pengatur (*regulatory body*): Bank Indonesia dan Bapepam. Bank Indonesia dan Bapepam sebagai pengatur yang mengeluarkan persyaratan minimum struktur pengendalian intern.

II.2.3 Komponen Struktur Pengendalian Intern

Laporan COSO (dan AU 319,07) mengidentifikasi lima komponen struktur pengendalian intern (Components of internal control) yang saling berhubungan, yaitu:

1. **Lingkungan pengendalian** (*control environment*) menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orang di dalam organisasi. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lain, yang menyediakan disiplin dan struktur (Abdul Halim, Auditing jilid 1:204).

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain (Mulyadi, Auditing buku 1:183) :

- a. Nilai integritas dan etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Dewan komisaris dan komite audit.
- d. Filosofi dan gaya operasi manajemen.
- e. Struktur organisasi.
- f. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab.
- g. Kebijakan dan praktik sumber daya.

Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orang didalam organisasi. Efektivitas informasi dan komunikasi serta aktivitas pengendalian sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan oleh lingkungan pengendalian.

2. **Penilaian risiko** (*risk Assessment*) merupakan pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas, yang membentuk suatu dasar mengenai bagaimana risiko yang harus dikelola (Abdul Halim, Auditing jilid 1:205).

Auditor harus memperoleh pemahaman penaksiran risiko manajemen, bagaimana manajemen mempertimbangkan risiko yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan dan memutuskan tindakan yang ditujukan ke risiko tersebut. Pengetahuan ini termasuk bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko, melakukan estimasi signifikan risiko, menaksir kemungkinan terjadinya dan menghubungkan dengan pelaporan keuangan.

Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti (Mulyadi, Auditing buku 1:188):

- a. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal.
- b. Perubahan standar akuntansi.
- c. Hukum dan peraturan baru.
- d. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi.
- e. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan personel yang terlibat dalam fungsi tersebut.

3. **Aktivitas pengendalian** (*control activities*) merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu menyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan (Abdul Halim, Auditing jilid 1:207).

Kebijakan dan prosedur aktivitas pengendalian memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas.

Aktivitas pengendalian menurut Mulyadi dari buku auditing, digolongkan sebagai berikut:

- a Pengendalian pengelolaan informasi.
 - 1) Pengendalian umum.
 - 2) Pengendalian aplikasi.
 - i. Otorisasi memadai.
 - ii. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan memadai.
 - iii. Pengecekan secara independen.
 - b Pemisahan fungsi memadai.
 - c Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan.
 - d *Review* atas kinerja.
4. **Informasi dan komunikasi** (*information and communication*) merupakan pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawab mereka (Abdul Halim, Auditing jilid 1:207).

Transaksi terdiri atas pertukaran aktiva dan jasa antara entitas dengan pihak luar dan transfer penggunaan aktiva dan jasa dalam entitas. Fokus utama kebijakan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji dalam manajemen di laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang tercatat atau terjadi adalah (Mulyadi, Auditing buku 1:189):

- a Sah.
- b Telah diotorisasi.
- c Telah dicatat.
- d Telah dinilai secara wajar.
- e Telah digolongkan secara wajar.
- f Telah dalam periode yang seharusnya.

Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar.

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik didalam maupun diluar organisasi. Komunikasi mencakup sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun dan memo juga Komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern.

5. **Pemantauan** (*monitoring*) merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu (Abdul Halim, Auditing jilid 1:207).

Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, di waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian intern telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.

II.2.4. Pentingnya Pemahaman Struktur Pengendalian Intern

Pentingnya pemahaman pengendalian intern karena pengendalian intern yang berlaku dalam entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas. Pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan yang diaudit dipengaruhi kepercayaan atas efektivitas pengendalian intern dalam mencegah terjadi kesalahan yang materil dalam proses akuntansi (Mulyadi, Auditing buku 1: 195).

Pemahaman auditor atas pengendalian intern digunakan untuk perencanaan audit. Perencanaan audit adalah bagian dari audit laporan keuangan yang berakhir pada penetapan kewajaran laporan keuangan. Secara khusus, Pemahaman auditor atas pengendalian intern berkaitan dengan suatu asersi adalah untuk digunakan dalam kegiatan (Mulyadi, Auditing buku 1: 195):

1. Kemungkinan atau tidak audit dapat dilaksanakan.

2. Salah saji potensial yang dapat terjadi.
3. Risiko deteksi.
4. Perancangan pengujian substantif.

Apabila auditor dalam rangka pemahaman pengendalian intern. Auditor menilai pengendalian klien sangat lemah atau sama sekali tidak ada. Auditor tidak memungkinkan untuk memberikan pendapat kewajaran laporan keuangan klien. Auditor harus menolak untuk melaksanakan audit atau menolak memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan.

Apabila auditor menemukan adanya kelemahan-kelemahan dalam rangka pemahaman pengendalian intern. Auditor bertanggung jawab memberitahukan penemuan kepada manajemen. Atas dasar informasi tersebut manajemen dapat memperbaiki pengendalian intern jika manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya dikorbankan.

II.2.4.1. Pemahaman Atas Pengendalian Intern

Standar auditing auditing kedua mewajibkan auditor memperoleh pemahaman memadai atas pengendalian intern dan menggunakan pemahaman memadai atas pengendalian tersebut sebagai dasar perencanaan audit. Pemahaman memadai atas pengendalian intern dapat diperoleh menggunakan 3 prosedur audit, yaitu:

1. Mewawancarai karyawan perusahaan yang berkaitan dengan unsur pengendalian.
2. Melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan.
3. Melakukan pengamatan atas kegiatan perusahaan.

Informasi yang dikumpulkan dalam melaksanakan ketiga prosedur audit dalam rangka pemahaman pengendalian intern menurut Mulyadi (buku auditing, hal 197) terdiri atas:

1. Rancangan berbagai kebijakan dan prosedur dalam tiap-tiap unsur pengendalian.
2. Apakah kebijakan dan prosedur tersebut benar dilaksanakan.

II.2.4.2. Pemahaman Atas Komponen Pengendalian Intern Untuk Perencanaan Audit

1. Pemahaman atas lingkungan pengendalian

Pemahaman informasi lingkungan pengendalian umumnya tidak didukung dokumentasi yang memadai. Informasi tentang lingkungan pengendalian dikumpulkan dengan cara: permintaan keterangan dari manajemen yang bertanggung jawab atas unsur pengendalian intern, inspeksi dokumen dan catatan, dan pengamatan atas kegiatan perusahaan.

2. Pemahaman atas penaksiran risiko

Auditor harus mengumpulkan informasi bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko berkaitan dengan penyajian laporan keuangan secara wajar dan kepedulian manajemen terhadap risiko tersebut, serta bagaimana manajemen merancang aktivitas pengendalian untuk mengatasi risiko tersebut.

3. Pemahaman atas informasi dan komunikasi

Sistem akuntansi entitas sangat menentukan risiko salah saji dalam laporan keuangan. Sistem akuntansi yang baik akan menghasilkan informasi akuntansi

yang handal. SA seksi 319 memberi panduan tentang informasi yang harus dikumpulkan auditor untuk memahami sistem akuntansi kliennya:

- a. Golongan utama transaksi dalam kegiatan perusahaan.
- b. Bagaimana transaksi-transaksi itu timbul dan dilaksanakan.
- c. Catatan akuntansi, dokumen sumber yang berkaitan pelaporan akuntansi.
- d. Proses pengolahan data (manual atau komputerisasi) yang dilakukan sejak saat transaksi terjadi sampai disajikan dalam laporan keuangan.
- e. Proses penyusunan laporan keuangan yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan, termasuk penaksiran akuntansi yang dilakukan manajemen.

4. Pemahaman atas aktivitas pengendalian

Auditor harus memahami kebijakan dan prosedur untuk memberikan kepastian perintah manajemen telah dilaksanakan sehingga tujuan entitas terlaksana. Pemahaman aktivitas pengendalian didapatkan bersamaan saat pemahaman atas: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi dan pemantauan dari pengendalian intern.

Auditor dapat melaksanakan pemahaman aktivitas pengendalian tambahan apabila menggunakan strategi audit pendahuluan pendekatan risiko pengendalian rendah. Ketika auditor menggunakan strategi audit pendahuluan pendekatan risiko pengendalian tinggi atau maksimum, maka pemahaman aktivitas pengendalian tambahan tidak diperlukan atau tidak efisien.

5. Pemahaman atas pemantauan

Auditor harus memahami jenis aktivitas yang digunakan oleh klien untuk memantau efektivitas pengendalian internal. Auditor harus pula memahami tindakan-tindakan yang diambil untuk memperbaiki unsur pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dalam pemantauan.

II.2.5. Keterbatasan Struktur Pengendalian Intern

Keterbatasan pengendalian intern suatu entitas (Bonyton & Johnson, 2002: 376).

1. *Kesalahan dalam pertimbangan.* Manajemen dan personel lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu atau prosedur lainnya.
2. *Kemacetan.* Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi karena personel salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kekeliruan atau kelelahan. Kemacetan juga dapat terjadi dikarenakan perubahan sementara atau permanen dalam personel, sistem atau prosedur.
3. *Kolusi.* Karyawan yang melaksanakan pengendalian penting dapat bekerjasama melakukan kecurangan dengan karyawan lain, konsumen atau pemasok. Karyawan tersebut dapat menutupi kecurangan yang dilakukan sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian intern.
4. *Penolakan manajemen.* Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah, seperti memanipulasi kondisi

keuangan entitas agar terlihat lebih baik. Praktik penolakan (*override*) termasuk membuat penyajian yang salah dengan sengaja kepada auditor atau menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif.

5. *Biaya versus manfaat*. Biaya pengendalian intern suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Manajemen tidak memungkinkan dan kesulitan mengukur dengan tepat biaya dan manfaat pengendalian intern. Manajemen harus membuat baik estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat.

II.2.6. Dokumentasi Struktur Pengendalian Intern

Dokumentasi pemahaman pengendalian intern merupakan suatu hal yang disyaratkan oleh Standar profesional Akuntan Publik. Pendokumentasian pengendalian intern ditujukan untuk merencanakan audit (Abdul Halim, Auditing jilid 1:216).

Ada tiga cara yang biasanya digunakan oleh auditor untuk mendokumentasikan informasi mengenai pengendalian intern yang berlaku di perusahaan, yaitu:

1. Kuesioner pengendalian intern

Kuesioner pengendalian intern berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai operasi kebijakan dan prosedur pengendalian intern. Kuesioner merupakan cara yang banyak dipakai auditor untuk mendokumentasikan pemahaman atas pengendalian intern klien (Abdul Halim, Auditing jilid 1:216).

Kuesioner disusun berdasar siklus transaksi. Pertanyaan yang diajukan dibuat sedemikian rupa, sehingga jawaban cukup dengan ”ya” atau “tidak”. Jawaban kuesioner sebagian besar “ya” menunjukkan pengendalian intern klien baik, sebaliknya bila jawaban sebagian besar “tidak” menunjukkan pengendalian intern lemah.

2. Uraian tertulis (*written description*)

Uraian tertulis terdiri atas uraian mengenai arus transaksi, catatan yang diselenggarakan, dan pembagian tanggung jawab yang ada dalam perusahaan (Mulyadi, auditing buku 1:201).

Uraian tertulis biasanya berisi identitas karyawan perusahaan yang menjalankan suatu fungsi dan uraian terinci cara pelaksanaan fungsinya. Kebaikan dari penggunaan uraian tertulis merupakan hal umum dan sederhana, namun kesulitan dalam mendeskripsikan rincian pengendalian intern kedalam kata-kata yang sederhana dan jelas.

3. Bagan alir sistem (*system flowchart*)

Bagan alir adalah teknik untuk menjelaskan stuktur pengendalian intern dengan menggunakan simbol-simbol yang disajikan secara diagram (Munawir, Auditing Modern buku 1: 239)

Bagan alir memudahkan auditor dalam menentukan secara cepat efektif atau tidak pengendalian intern klien. Bagan alir dapat menghindari penelaahan secara rinci atas uraian tertulis dan jawaban kuesioner pengendalian intern.

II.3 STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN PENJUALAN KREDIT

Penjualan kredit adalah bagian dari siklus pendapatan. Komponen pengendalian intern siklus pendapatan dipengaruhi risiko melekat (*inherent risk*) yang tinggi, yaitu terjadi penyelewengan dalam laporan keuangan dengan kecenderungan *overstatement* untuk pendapatan dan piutang dagang. (Munawir, Auditing modern buku 2: 2005).

Risiko melekat pada penjualan kredit dapat diatasi dengan rancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang efektif. Pengendalian intern yang efektif dapat menyebabkan risiko pengendalian turun, terutama untuk asersi keberadaan atau keterjadian; penilaian atau alokasi yang berkaitan dengan siklus pendapatan.

Pengendalian intern penjualan kredit memberikan keyakinan memadai lima asersi manajemen, khususnya asersi keberadaan atau keterjadian: apakah sudah dilakukan pencatatan transaksi penjualan pada periode tertentu dan asersi penilaian atau alokasi apakah pencatatan transaksi sudah dicantumkan dalam laporan keuangan dalam jumlah semestinya.

II.3.1 Fungsi Terkait Penjualan Kredit

Tanggung jawab setiap fungsi yang terkait dalam transaksi penjualan kredit diuraikan sebagai berikut (Mulyadi, Auditing buku 1:40-41) :

1. Fungsi penjualan

Fungsi penjualan bertanggung jawab menerima surat order dari *costumer*, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman, pengiriman dari gudang mana barang akan dikirim dan mengisi surat order

pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar sisa pesanan "back order" pada saat diketahui tidak tersedianya sediaan untuk memenuhi order dari *costumer* dan memo kredit untuk retur penjualan.

2. Fungsi kredit

Fungsi kredit berada dibawah departemen keuangan bertanggung jawab meneliti status kredit *costumer* dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada *costumer*.

3. Fungsi gudang

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh *costumer*, serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman.

4. Fungsi pengiriman

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar tanpa ada otorisasi dari yang berwenang.

5. Fungsi penagihan

Fungsi ini bertanggung jawab membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada *costumer*, serta menyediakan *copy* faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi pencatat piutang, fungsi akuntansi biaya, fungsi akuntansi umum.

6. Fungsi Pencatatan piutang

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit, mencatat berkurangnya piutang karena transaksi retur penjualan, penerimaan kas dari piutang, penghapusan piutang tak tertagih, membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur.

7. Fungsi akuntansi biaya

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat biaya produk jadi yang dijual dalam buku pembantu sediaan dan mencatat biaya produk jadi yang dikembalikan oleh *customer* dalam transaksi retur pembelian.

8. Fungsi akuntansi umum

Fungsi ini bertanggung jawab mencatat transaksi penjualan kredit dan penjualan tunai dalam jurnal penjualan, dan transaksi retur penjualan, pencadangan kerugian piutang dan penghapusan piutang dalam jurnal umum.

9. Fungsi penerimaan barang

Fungsi ini bertanggung jawab menerima barang, yang berasal dari transaksi pembelian maupun yang berasal dari transaksi retur penjualan.

II.3.2 Dokumen Transaksi Penjualan Kredit

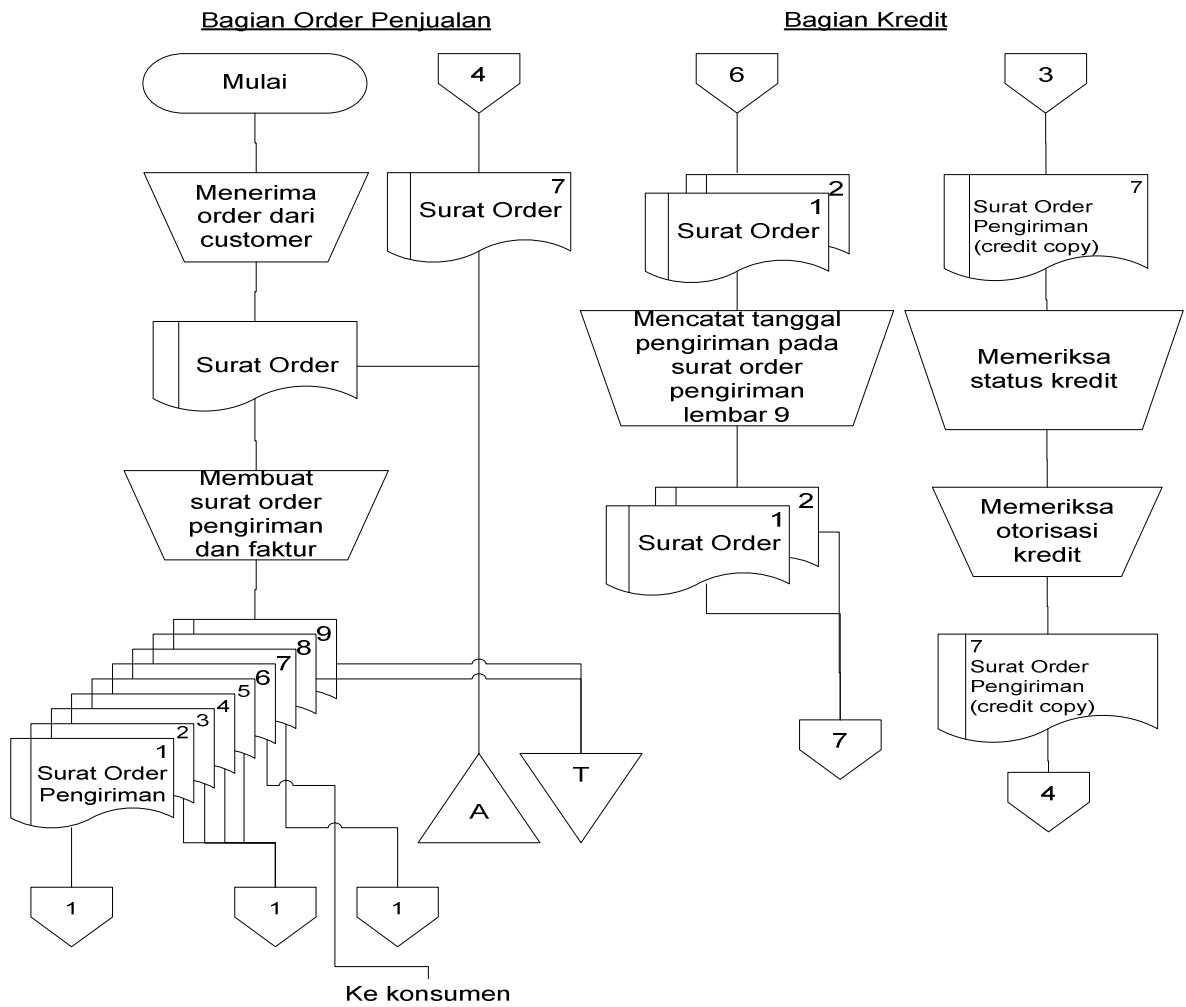
Dokumen yang digunakan dalam transaksi penjualan kredit dibagi menjadi dua golongan (Mulyadi, Auditing buku 1:41):

1. Dokumen sumber (*source document*), yaitu dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam catatan akuntansi. Kwitansi adalah dokumen sumber dalam transaksi penjualan kredit.

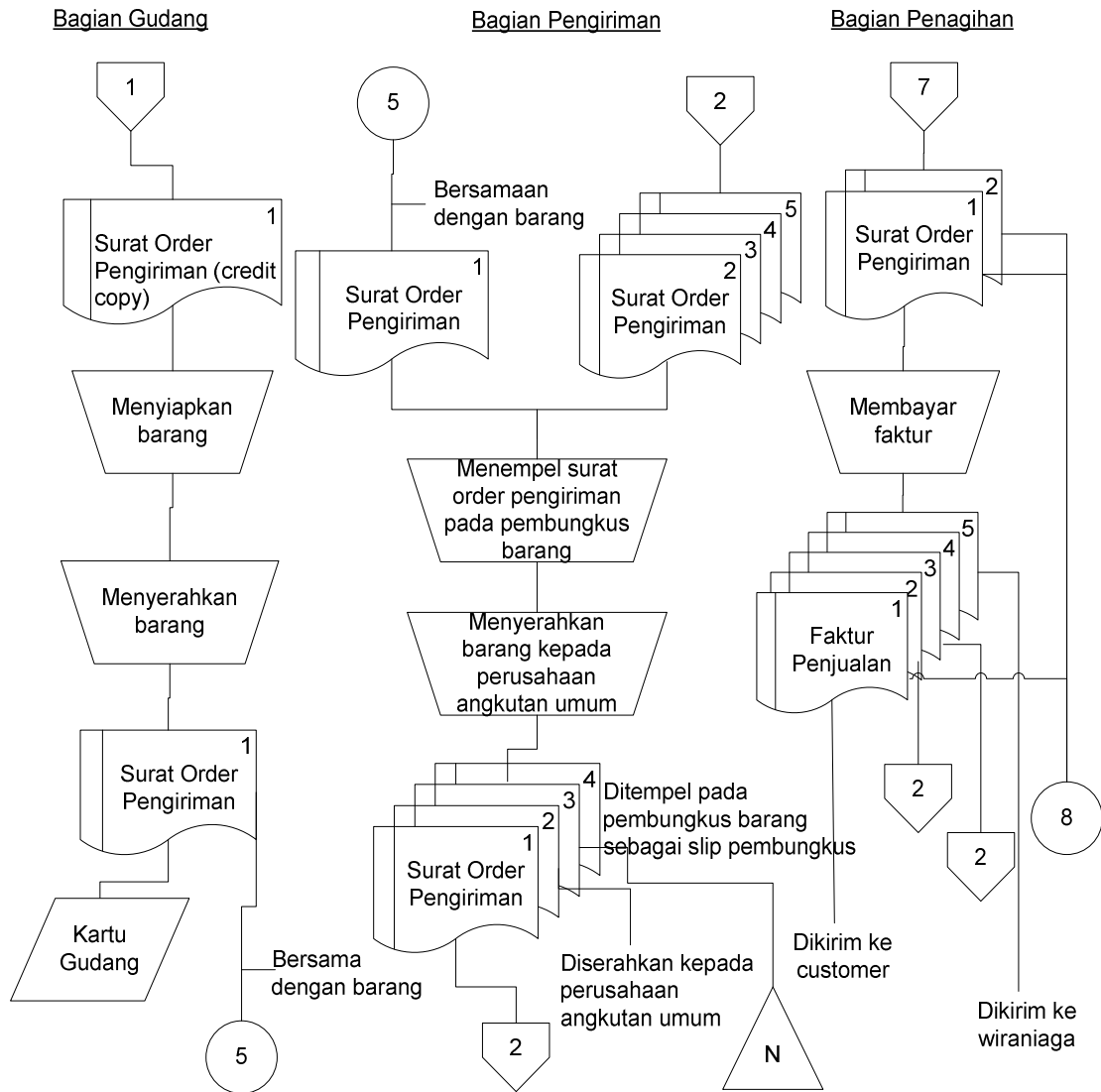
2. Dokumen pendukung (*corroborating documents* atau dokumen penguat) yaitu dokumen yang membuat validitasnya terjadi transaksi. Surat order pengiriman dan surat Muat (Bill of lading) adalah dokumen pendukung dalam transaksi penjualan kredit.

II.3.3 Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi

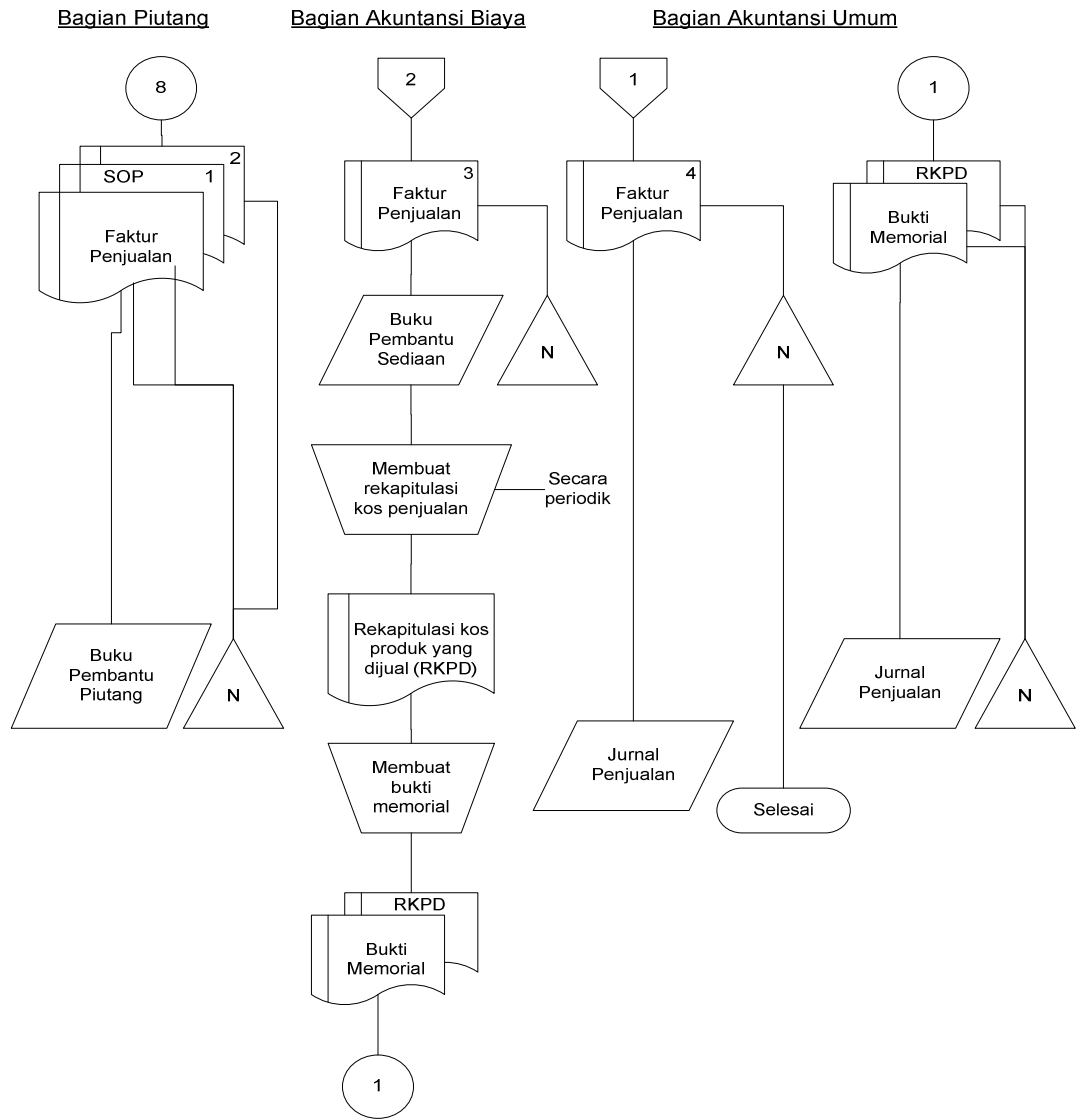
Bagan alir sistem informasi akuntansi adalah dasar perancangan program audit untuk pengujian pengendalian dan perancangan program audit pengujian substantif. Bagan alir sistem penjualan kredit untuk menggambarkan kegiatan penjualan kredit dalam suatu perusahaan dengan memasukkan unsur pengendalian intern, dapat dilihat pada gambar 2.1:



Gambar 2.1
 Bagan Alir Sistem Penjualan Kredit
 (Sumber : Mulyadi, Auditing buku 1: 44-47)



Gambar 2.1
 Bagan Alir Sistem Penjualan Kredit (Lanjutan)
 (Sumber : Mulyadi, Auditing buku 1: 44-47)



Keterangan:
 SOP : Surat Order Pengiriman
 RKPD : Rekap kos produk yang dijual

Gambar 2.1
 Bagan Alir Sistem Penjualan Kredit (Lanjutan)
 (Sumber : Mulyadi, Auditing buku 1: 44-47)

II.4. MENILAI RISIKO PENGENDALIAN

Menilai risiko pengendalian (*assessing control risk*) merupakan suatu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian intern suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan (Bonyton, modern auditing: 443).

Tujuan penilaian risiko pengendalian adalah untuk membantu auditor dalam membuat suatu pertimbangan mengenai risiko salah saji material dalam asersi laporan keuangan. Penilaian risiko pengendalian berkaitan dengan evaluasi terhadap efektivitas dari (1) rancangan dan (2) pengoperasian pengendalian. Menilai risiko pengendalian membantu auditor dalam menentukan sifat, saat, luas dari prosedur audit.

Auditor memulai penilaian risiko pengendalian berdasar atas asersi kelas transaksi. Penilaian risiko pengendalian dibuat untuk asersi individual, bukan untuk pengendalian intern keseluruhan, bukan untuk komponen pengendalian intern individual dan bukan kebijakan atau prosedur individual. Penilaian risiko pengendalian yang berkaitan dengan siklus pendapatan dapat berdasar masing-masing asersi keberadaan atau keterjadian; asersi penilaian atau alokasi; dan asersi kelengkapan. Berikut ini langkah penting auditor dalam melaksanakan penilaian risiko pengendalian berdasar atas asersi kelas transaksi (Bonyton, modern auditing: 443):

1. Mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari *prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman* mengenai apakah pengendalian yang

berhubungan dengan asersi telah *dirancang* dan *diterapkan dalam operasi* oleh manajemen entitas.

2. Mengidentifikasi *salah saji potensial* yang dapat muncul dalam asersi entitas.
3. Mengidentifikasi *pengendalian-pengendalian yang diperlukan* yang mungkin akan mencegah atau memperbaiki salah saji.
4. Melaksanakan *pengujian pengendalian* terhadap pengendalian-pengendalian yang diperlukan untuk menentukan *efektivitas rancangan dan pengoperasian dari pengendalian-pengendalian tersebut*.
5. Mengevaluasi bukti dan *membuat penilaian*.

II.4.1. Mempertimbangkan Pengetahuan Yang Diperoleh Dari Prosedur Untuk Memperoleh Suatu Pemahaman

Auditor melaksanakan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai pengendalian intern. Auditor selanjutnya mendokumentasikan pemahaman pengendalian intern dalam bentuk kuesioner, bagan arus atau memorandum naratif. Analisis pendokumentasian merupakan titik awal untuk menilai risiko pengendalian. Pemahaman auditor secara khusus digunakan untuk (1) Mengidentifikasi jenis salah saji potensial dan (2) mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi salah saji material, yaitu seperti apakah pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji telah dirancang dan diterapkan dalam operasi.

II.4.2. Mengidentifikasi Salah Saji Potensial

Salah saji potensial adalah salah satu pengetahuan yang diperoleh dari prosedur pemahaman pengendalian intern dan menunjukkan salah saji material dapat terjadi pada asersi kelas transaksi.

Salah saji potensial dapat diidentifikasi untuk asersi yang berhubungan dengan setiap kelas transaksi utama dan untuk asersi yang berhubungan dengan setiap saldo akun yang signifikan. Contoh salah saji potensial dalam rangka pengujian penendalian pada transaksi penjualan kredit tabel 2.1.

Salah saji potensial (asersi)	Pengendalian yg diperlukan	Pengujian pengendalian
Transaksi penjualan kredit fiktif dicatat	Setiap pencatatan dalam kartu piutang harus berdasarkan faktur penjualan.	Inspeksi (<i>inspecting</i>) faktur penjualan untuk order penjualan yang disetujui dan membandingkan dengan kartu piutang.
Faktur penjualan tidak dicatat dalam kartu piutang customer	Pengecekan jumlah yang tercatat dalam kartu piutang sama dengan total faktur penjualan.	Inspeksi (<i>inspecting</i>) faktur penjualan untuk order penjualan yang disetujui dan membandingkan dengan kartu piutang.
Faktur penjualan mungkin memiliki harga yang tidak benar (harga yang tercantum bukan harga sebenarnya).	Pengecekan independen pemberian harga dalam faktur penjualan	Inspeksi (<i>inspecting</i>) keakuratan pencantuman harga pada faktur penjualan.
Faktur penjualan mungkin dicatat ke kartu piutang rekening customer yang salah.	Mencocokkan nama/toko customer dalam faktur penjualan dengan kode customer dan nama customer pada kartu piutang pada saat melakukan pencatatan.	Inspeksi (<i>inspecting</i>) faktur penjualan dan membandingkan dengan kartu piutang.

Tabel 2.1 Salah saji material, pengendalian yang diperlukan dan pengujian pengendalian transaksi penjualan kredit¹.

¹ Tabel 2.1 diambil dari skripsi Audit Struktur Pengendalian Intern Sistem Penjualan Kredit Pada Perusahaan Kantong Plastik Putera Gombong Disusun oleh: Raymondus Hari Prihantoro.

II.4.3. Mengidentifikasi Pengendalian Diperlukan

Auditor setelah dapat mengidentifikasi salah satu potensi asersi kelas transaksi. Maka, Auditor perlu mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi salah satu potensi asersi kelas transaksi. Auditor harus menentukan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah satu yang telah dirancang dan diterapkan dalam operasi.

Contoh pengendalian yang diperlukan dalam rangka pengujian pengendalian pada transaksi penjualan kredit tabel 2.1.

II.4.4. Melaksanakan Pengujian Pengendalian

Pengujian pengendalian dapat dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan terhadap personel, mengamati personel klien dalam melaksanakan pengendalian dan bukti pendokumentasian inspeksi. Hasil dari setiap pengujian akan menyediakan bukti dari *efektivitas rancangan dan operasi pengendalian yang diperlukan*.

Auditor dapat melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif dengan memakai konsep sampling audit. Sampling audit sebagai penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi kurang dari seratus persen dengan tujuan menilai beberapa karakteristik saldo akun.

Auditor dapat melakukan pengujian audit dengan menggunakan sampling statistik (*statistical sampling*) atau sampling nonstatistik (*nonstatistical sampling*). Kedua jenis sampling memerlukan pertimbangan dalam perencanaan

dan pelaksanaan rencana sampling serta pengevaluasian hasil. Kedua jenis sampling dapat memberikan bahan bukti yang cukup sebagaimana yang disyaratkan dalam standar pekerjaan lapangan yang kedua. Sampling statistik adalah penerapan prosedur pemilihan sampel secara acak dari seluruh anggota populasi, dan menganalisis hasil pemeriksaan anggota sampel secara matematis. Sampling nonstatistik adalah penerapan pemilihan sampel dengan menggunakan pertimbangan auditor (*judgemnet sample*) atau acak (*representative sample*), evaluasi hasil pemeriksaan sampel tidak dilakukan secara matematis.

Sampling statistik dibagi menjadi dua: *attribute sampling* dan *variable sampling*. *Attribute sampling* atau disebut pula *propotional sampling* digunakan untuk menguji pengendalian intern (dalam pengujian pengendalian), sedangkan *variable sampling* digunakan terutama untuk menguji nilai rupiah yang tercantum dalam akun (dalam pengujian substantif) (Mulyadi, auditing buku 1, hal 253).

Attribute sampling adalah suatu model statistik yang digunakan untuk mengestimasi tingkat terjadinya suatu *attribute* dalam populasi. *Attribute* merupakan karakteristik yang membedakan elemen tersebut dengan elemen yang lain, dalam hubungan dengan pengujian pengendalian *attribute* adalah penyimpangan dari atau tidaknya unsur tertentu dalam pengendalian yang seharusnya ada.

II.4.4.1. Pengujian Pengendalian *Attribute Sampling*

Pengujian pengendalian menggunakan *attribute sampling* mensyaratkan beberapa prosedur yang harus dilakukan yaitu (Bonyton & Johnson,2002: 554-565):

1. Menentukan tujuan audit

Tujuan umum audit dalam pengujian pengendalian adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur penjualan kredit telah berhasil menjaga kekayaan organisasi dan menjamin ketelitian serta dapat dipercayanya data akuntansi.

Sedangkan untuk tujuan khusus, ada beberapa tujuan dalam unsur struktur pengendalian intern terhadap penjualan kredit, antara lain:

- a. Memeriksa apakah setiap transaksi penjualan kredit telah diotorisasi dengan semestinya.
- b. Memeriksa apakah faktur penjualan telah menggunakan formulir yang bernomor urut tercetak.
- c. Memeriksa apakah pencantuman harga pada kwitansi penjualan dengan jurnal penjualan telah sesuai.
- d. Memeriksa apakah pencantuman kuantitas pada kwitansi penjualan dengan jurnal penjualan telah sesuai.
- e. Memeriksa apakah faktur penjualan telah dilampiri dokumen pendukung yang lengkap.

2. Menentukan unit populasi dan unit sampel

Auditor memahami populasi sebagai komponen kelompok transaksi yang diuji. Populasi terdiri atas unit sampling (*sampling unit*), yaitu elemen individual dalam populasi (Bonyton & Johnson and jonhson,2002: 555). Unit sampling dapat berupa dokumen, item-item dalam dokumen, ayat jurnal atau catatan dalam arsip komputer.

Unit sampel mempunyai dampak yang signifikan terhadap efisiensi audit. Efisiensi selanjutnya akan ditingkatkan ketika item sampel dapat mengevaluasi evaluasi pengendalian untuk berbagai asersi.

3. Menentukan *attribute* yang akan diuji

Attribute yang akan diuji harus diidentifikasi secara jelas sesuai dengan tujuan khusus yang hendak dicapai dalam kebijakan dan prosedur pengendalian serta sisitem akuntansi terhadap transaksi penjualan kredit.

Attribute yang akan diuji meliputi:

- a. Memeriksa apakah terdapat nomor dokumen kwitansi bernomor urut cetak.
- b. Memeriksa apakah nama pasien atau nomor RM pada dokumen kwitansi telah sesuai dengan dokumen RM 1, RM 2, RM 2L, dokumen visite dokter, dokumen formulir pindah ruang/bangsral (bila ada), dokumen perhitungan yang harus dibayar pasien dan dokumen penyelesaian rawat inap.
- c. Memeriksa apakah kelas perawatan pasien pada dokumen kwitansi telah sesuai dengan dokumen perhitungan yang harus dibayar pasien.

- d. Memeriksa apakah status pasien pada dokumen kwitansi sesuai dengan dokumen RM 1, RM 2, RM 2L.
 - e. Memeriksa apakah jasa akomodasi, jasa keperawatan, biaya administrasi sistem informasi manajemen, biaya penunggu pasien dan jasa visite dokter telah dicatat pada dokumen kwitansi.
 - f. Memeriksa apakah jumlah kuantitas (akomodasi, jasa keperawatan, biaya administrasi sistem informasi manajemen dan biaya penunggu pasien) pada dokumen kwitansi telah sesuai dengan dokumen perhitungan yang harus dibayar pasien.
 - g. Memeriksa apakah dokumen kwitansi sudah mencantumkan kuantitas visite dokter telah sesuai dengan dokumen visite dokter.
 - h. Memeriksa apakah ada tanda tangan dari verifikator bagian mobilisasi dana pada dokumen kwitansi.
 - i. Memeriksa apakah adanya tanda tangan otorisasi pada dokumen pendukung (dokumen RM 1, RM 2, RM 2L, dokumen visite dokter, dokumen formulir pindah ruang/bangsal (bila ada), dokumen perhitungan yang harus dibayar pasien dan dokumen penyelesaian rawat inap).
4. Menentukan ukuran sampel

Metode *attribute sampling stop-or-go sampling* menghindari kemungkinan auditor akan terlalu banyak mengambil sampel. Berikut ini akan dibahas faktor-faktor yang akan mempengaruhi penentuan sampel yaitu:

- a. Tingkat Kendalan (*Confidence Level / CL*) dan Tingkat Penerimaan Risiko (*Rate of Occurrence / RO*)

Tingkat keandalan atau disingkat R% adalah probabilitas benar dalam mempercayai efektivitas struktur pengendalian intern. Tingkat keandalan ini ditentukan atas dasar hasil evaluasi terhadap struktur pengendalian intern perusahaan. Apabila SPI tidak dapat diandalkan, berarti auditor tidak perlu menentukan CL dan tidak dapat menentukan *attribute sampling* dalam pemeriksaan, berikut ini diberikan petunjuk penentuan CL yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Petunjuk Penggunaan CL	
Hasil Evaluasi Terhadap SPI	(CL)
Menurut Pertimbangan Profesional Auditor	
Sangat Dapat Diandalkan	Max 99%
Dapat Diandalkan	95%
Cukup Dapat Diandalkan	Min 90%

Tabel. 2.2 Petunjuk Penggunaan CL

Sumber; (Mulyadi, Auditing buku 1:)

Apabila kepercayaan Auditor terhadap struktur pengendalian intern cukup tinggi, umumnya disarankan untuk tidak menggunakan tingkat keandalan kurang dari 95% dan tidak menggunakan *acceptable precision limit* lebih besar dari 5%.

- b. Batas ketepatan atas yang diinginkan (*Desired Upper Precision Limit / DUPL*)

DUPL merupakan batas ketelitian maksimum yang dianjurkan dan dapat diterima auditor terhadap hasil sampel. Apabila tingkat kesalahan dalam sampel melebihi DUPL, mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa SPI perusahaan tidak efektif. Tingkat kesalahan dalam sampel disebut *Achieved Upper Precision Limit* (AUPL). AUPL kemudian dibandingkan dengan DUPL. Dengan demikian DUPL merupakan tolak ukur terhadap hasil sampel yang dihitung secara matematis. Penentuan DUPL berdasarkan penilaian auditor terhadap SPI perusahaan Petunjuk penentuan DUPL dapat dilihat pada tabel berikut:

Petunjuk Penentuan DUPL	
Hasil Evaluasi Terhadap SPI Menurut Pertimbangan Profesional Auditor	(DUPL)
Cukup Dapat Diandalkan	Max 10%
Dapat Diandalkan	5%
Sangat Dapat Diandalkan	Min 1%

Tabel. 2.3 Penentuan DUPL
Sumber; (Mulyadi, Auditing buku 1)

c. Penaksiran persentase terjadinya *attribute* dalam populasi

Penaksiran ini didasarkan pada pengalaman auditor di masa yang lalu atau dengan melakukan percobaan. Auditor harus menentukan tingkat keandalan dan DUPL ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan besarnya sampel minimum yang harus diambil oleh auditor dengan bantuan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian.

<i>Acceptable Upper Precision Limit</i>	<i>Sample sized based on confidence level</i>		
	90%	95%	97,5%
10%	24	30	37
9%	27	34	42
8%	30	38	47
7%	35	43	53
6%	40	50	62
5%	48	60	74
4%	60	75	93
3%	80	100	124
2%	120	150	185
1%	240	300	370

Tabel 2.4
Tabel Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Pengendalian
(Zero Expected Occurences)
(Sumber: Mulyadi, Auditing buku 1: 265)

**Cara Pencarian Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian
Pengendalian**

DUPL	<u>Besarnya Sampel atas Dasar Pengujian Pengendalian</u>		
	90%	95%	97.5%
10%			
9			
8			
7			
6			
5		↓	
4			
3			

Tabel 2.5 Sampel Minimum untuk Pengujian Pengendalian
(Sumber: Mulyadi, Auditing buku 1: 266)

Auditor telah menentukan tingkat keandalan sebesar 95% dan *Desired Upper Precision Limit* sebesar 5% maka jumlah pertama sampel yang harus diambil sebanyak 60 lembar faktur penjualan.

5. Menentukan metode pemilihan sampel

Dalam penelitian ini akan digunakan metode *attribute sampling stop-or-go sampling*. Auditor memilih semua anggota sampel secara acak dari seluruh anggota populasi, dan menganalisis dengan cara matematis. Jika dua atau lebih auditor menggunakan parameter yang sama dalam pengambilan sampel, maka akan menghasilkan konklusi yang tidak berbeda secara statistik.

Auditor menentukan besarnya sampel pengujian pengendalian sebanyak 60 lembar faktur penjualan. Keseluruhan faktur penjualan entitas akan memperoleh kesempatan untuk dipilih secara acak dan diambil sebanyak 60 lembar faktur penjualan sebagai anggota sampel. Auditor akan menggunakan tabel angka acak, agar setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

6. Memeriksa *attribute* yang menunjukkan efektivitas unsur struktur pengendalian intern

Auditor telah menentukan 60 lembar faktur penjualan, selanjutnya adalah memeriksa sampel tersebut sesuai dengan *attribute* yang akan diuji. Jika auditor menemukan penyimpangan dalam hal tidak ada otorisasi kredit faktur penjualan, tidak ada kelengkapan nomor urut tercetak pada faktur penjualan, tidak ada kesesuaian pencantuman harga pada faktur penjualan dengan jurnal penjualan dan tidak ada dokumen pendukung faktur penjualan. Penyimpangan tersebut adalah *attribute*, yaitu penyimpangan dari unsur pengendalian intern yang seharusnya ada. Auditor harus mencatat beberapa kali menemukan penyimpangan.

7. Mengevaluasi hasil sampel

Penyimpangan yang ditemukan dalam sampel harus dievaluasi.

Berikut ini dijelaskan evaluasi hasil sampel *attribute sampling* pada model *stop-or-go sampling*.

AUPL dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AUPL = \frac{\text{confidence level factor at desired reliability level for accuracy observed}}{\text{Sample size}}$$

Gambar 2.2 Rumus AUPL.

AUPL adalah tingkat keandalan, jumlah kesalahan dalam sampel dan jumlah sampel yang diperiksa. Apabila AUPL lebih besar dari DUPL maka auditor perlu menambah jumlah sampel yang akan diperiksa. Hal ini dikarenakan kriteria sampling belum tercapai. Pengambilan sampel dihentikan bila $AUPL \leq DUPL$.

Langkah ke -	Besarnya Sampel Kumulatif yang Digunakan	Berhenti Jika Kesalahan Kumulatif yang Terjadi Sama Dengan	Lanjutkan ke Langkah Berikutnya Jika Kesalahan yang Terjadi Sama dengan	Lanjutkan ke Langkah 5 Jika Kesalahan Paling Tidak Sebesar
1	60	0	1	4
2	96	1	2	4
3	126	2	3	4
4	156	3	4	4
5	Gunakan <i>fixed sample-size-attribute sampling</i>			

Tabel 2.6 Tabel *stop-or-go decision*
(Sumber : Mulyadi, Auditing buku 1: 266)

II.4.5 Mengevaluasi Bukti dan Memberikan Penilaian

Auditor saat mengevaluasi bukti yang menunjukkan penyimpangan atas attribute yang diuji akan menemukan *Achieved Upper Precision Limit* (AUPL). Langkah auditor melanjutkan dengan memberikan penilaian apakah unsur pengendalian intern efektif. AUPL kemudian dibandingkan dengan DUPL.

Kesimpulan unsur pengendalian intern akan efektif apabila $AUPL \leq DUPL$. Jika Auditor menemukan $AUPL > DUPL$, kesimpulannya adalah unsur pengendalian intern klien tidak efektif. Auditor dapat mengurangi salah saji material untuk suatu asersi apabila auditor menemukan bukti bahwa pengendalian intern atas asersi tersebut telah secara efektif dirancang dan diterapkan dalam operasi.